

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Nurmiati¹, Bastian Lubis², Irma Yanti³,

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

nurmiati@patria-artha.ac.id¹

lubis.bastian@patria-artha.ac.id²

irmayantialii@gmail.com³

ABSTRACT

This research was conducted to assess the Effectiveness and Efficiency of performance at the Enrekang Regency Public Works Office. The method used in this study is a quantitative descriptive method, namely analyzing the realization of the 2018 to 2021 Public Works Department budget and expenditure budget using effectiveness ratios and efficiency ratios. The results of the study show that the levels and criteria for the effectiveness of using the budget and the realization of the Enrekang Regency Public Works Office for 2018-2021 vary widely. The implementation of the 2018-2021 Expenditure Budget is said to be quite effective Judging from these calculations, the performance of the Enrekang Regency Public Works Office is quite effective because the average result achieved is 84.26%, while for budget calculations regarding the level of efficiency in spending each year the criterion is said to be efficient because based on 2018 calculations it was 80.20%, year 2019 amounted to 77.86%, 2020 amounted to 78.80% and 2021 amounted to 13.09%. Judging from these calculations, the performance of the Enrekang Regency Public Works Office is efficient because the average result achieved is 62,48%.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget, Performance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018 sampai 2021 dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penggunaan anggaran belanja dan realisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang tahun 2018-2021 sangat bervariasi. Pelaksanaan Anggaran Belanja tahun 2018-2021 dikatakan cukup efektif. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang cukup Efektif karena rata-rata hasil yang dicapai 84,26% sedangkan untuk perhitungan anggaran mengenai tingkat Efisiensi pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan Efisien karena berdasarkan perhitungan tahun 2018 sebesar 80,20%, tahun 2019 sebesar 77,86%, tahun 2020 sebesar 78,80% dan tahun 2021 sebesar 13,09%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Efisien karena rata-rata hasil yang dicapai 62,48%.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran, Kinerja.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja dalam organisasi dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas berguna untuk menilai dalam mengalokasikan keuangan pada setiap kegiatan atau program dengan cara memanfaatkan dari sumber daya dan dilakukan secara ekonomis. Dapat dikatakan efisiensi (hemat) apabila penggunaan keuangan dilakukan secara tertib serta dapat memenuhi tujuan (efektif). Kinerja juga menjadi fokus penting dalam semua tahapan pelaksanaan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara kita. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dalam penyusunan anggaran pemerintah. Anggaran berbasis kinerja dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Penjelasan Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa anggaran berbasis prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Mardiyah Ulfa (2018) mengenai Analisis realisasi

anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Kabupaten Enrekang memiliki 12 kecamatan dan terdiri dari 112 desa dan 7 kelurahan. Berdasarkan badan pusatstatistik kabupaten jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 mencapai 227.520 jiwa, yang terdiri dari 115.836 jiwa laki-laki dan 111.684 jiwa perempuan.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2021 jumlah anggaran dan realisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	2018	125.141.913.358	102.168.084.810	81,64%
2.	2019	115.139.006.587	76.454.611.784	66,40%
3.	2020	161.187.796.471	129.212.967.327	80,16%
4.	2021	426.631.259.955	146.786.005.359	34,40%

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 1. menunjukkan bahwa total realisasi anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Enrekang selama tahun 2018-2020 belum pernah tercapai

bahkan di tahun 2021 tingkat capainnya hanya sebesar 34,40%. Hal ini menarik

untuk diteliti terutama terkait penilaian kinerja.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Sektor Publik

Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan (Supriyono 2015:5).

Anggaran sektor publik merupakan perencanaan perkiraan

tentang pengeluaran dan penerimaan data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sector publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu lembaga atau instansi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap kegiatan dan aktivitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus dipublikasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana publik.

Terdapat beberapa fungsi anggaran sektor publik, antara lain:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut

2. Anggaran sebagai alat bantu pengendalian

Sebagai alat bantu pengendalian, anggaran memberikan rencana yang detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat

digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud

komitmen kepada pemberi wewenang

7. Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran sebagai alat motivasi yang dapat memotivasi pegawai agar target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi hingga dapat dipenuhi dan juga jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional

2. Anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan dan perabot. Pada dasarnya

pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik

Efektivitas

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan

atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Efisiensi

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, Jalan Sultan Hasanuddin, Puserren, Enrekang Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

sektor publik lebih bersifat relatif.

Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu

deskriptif kuantitatif. Hal ini dilaksanakan yaitu dengan cara menganalisis, menafsirkan dan mengolah data pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Analisis Efektivitas, dihitung dengan

cara:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas Belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih mencapai 100%, maka Anggaran dikatakan sangat efektif
- b. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka anggaran dikatakan efektif
- c. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka anggaran dikatakan cukup efektif
- d. Jika hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka anggaran dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil perbandingan mencapai di bawah 75%, maka anggaran dikatakan tidak efektif

2. Analisis Efisiensi, dihitung dengan

cara:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Analisis Rasio Efisiensi dapat

dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran dikatakan tidak efisien
- b. Jika hasil perbandingan lebih dari 90-100% maka anggaran dikatakan kurang efisien
- c. Jika hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran dikatakan cukup efisien
- d. Jika hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran dikatakan efisien
- e. Jika hasil perbandingan mencapai di bawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat efisien

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Umum Kabupaten Enrekang
Berikut adalah rincian Tahun 2018 dapat dilihat pada
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
1.	Gaji dan Tunjangan	3.417.898.630	3.416.006.664	99,94%	1.891.966
	Sub Total	3.417.898.630	3.416.006.664	99,94%	1.891.966
2.	Belanja Barang	9.612.977.011	9.562.939.912	99,47%	50.037.099
3.	Belanja Modal	112.111.037.717	89.189.138.234	79,55%	22.921.899.483
	Sub Total	121.724.014.728	98.752.078.146	81,12%	22.971.936.582
	Total	125.141.913.358	102.168.084.810	81,64%	22.973.828.548

Sumber : Data diolah, 2022

Berikut adalah rincian Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2019
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
1.	Gaji dan Tunjangan	3.097.575.514	3.056.151.410	98,66%	41.424.104
	Sub Total	3.097.575.514	3.056.151.410	98,66%	41.424.104
2.	Belanja Barang	10.867.823.917	10.444.412.414	96,10%	423.411.503

3.	Belanja Modal	101.173.607.156	62.954.047.960	62,22%	38.219.559.196
	Sub Total	112.041.431.073	73.398.460.374	65,51%	38.642.970.699
	Total	115.139.006.587	76.454.611.784	66,40%	38.684.394.083

Sumber : Data diolah, 2021

Berikut adalah rincian Anggaran Kabupaten Enrekang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
1.	Gaji dan Tunjangan	2.698.331.915	2.692.830.913	99,79%	5.501.002
	Sub Total	2.698.331.915	2.692.830.913	99,79%	5.501.002
2.	Belanja Barang	16.571.450.290	14.890.771.182.	89,85%	1.680.679.108
3.	Belanja Modal	141.918.014.230	111.629.367.232	78,65%	30.288.646.998
	Sub Total	158.489.464.520	126.520.138.414	79,82%	31.969.326.106
	Total	161.187.796.471	129.212.967.327	80,16%	31.974.827.144

Sumber : Data diolah, 2022

Berikut adalah rincian Anggaran Kabupaten Enrekang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
1.	Gaji dan Tunjangan	2.899.403.678	2.770.540.772	95,56%	128.862.960
	Sub Total	2.899.403.678	2.770.540.772	95,56%	128.862.960
2.	Belanja Barang	14.398.893.340	11.815.298.656	82,06%	2.583.594.684

3.	Belanja Modal	409.332.962.937	132.182.165.931	32%	275.150.797.006
	Sub Total	423.731.856.277	143.997.464.587	33,98%	279.734.391.690
	Total	426.631.259.955	146.786.005.359	34,40%	279.863.254.596

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2,3,4, dan 5 menunjukkan bahwa Sisa gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.891.966,00 dan sisa gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp41.242.104,00 kemudian sisa gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2020 adalah sebesar Rp5.501.002,00 serta sisa gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp128.862.960 kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Sisa belanja barang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.50.037.966,00 dan sisa belanja barang pada tahun 2019 adalah sebesar

Rp.423.411.503,00. Sisa belanja barang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.680.679.108 dan sisa belanja barang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.583.594.684. Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan Dinas

Sisa Belanja modal pada tahun 2018 adalah sebesar Rp22.921.899.483,00 dan belanja modal pada tahun 2019 adalah sebesar Rp38.219.559.196,00. kemudian belanja modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp30.969.326.106 dan belanja modal pada tahun 2021 adalah sebesar Rp275.150.797,00.

Belanja modal yang dimaksud pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang yaitu pengeluaran 2020 adalah sebesar yang dilakukan dalam rangka Rp31.974.827.144,00 dan sisa anggaran pembentukan modal. Dalam belanja akhir bulan 31 Desember 2019 adalah ini termasuk untuk peralatan dan sebesar Rp279.863.254.596 mesin, gedung, jaringan maupun dikembalikan ke negara sesuai aturan bentuk fisik lainnya. Jumlah sisa pemerintah. anggaran akhir bulan 31 Desember 2018 adalah sebesar *Analisis Efektivitas dan Efisiensi* Berikut adalah hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang:

Tabel 6
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Anggaran			Efektifitas	Efisiensi
		Gaji dan Tunjangan	Belanja Barang	Belanja Modal		
1.	2018	99,94%	99,47%	79,55%	92,98%	80,20%
	Kriteria	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efisien
2.	2019	98,66%	96,10%	62,22%	85,66%	77,86%
	Kriteria	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Efisien
3.	2020	99,79%	89,85%	78,65%	89,43%	78,80%
	Kriteria	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Efisien
4.	2021	95,56%	82,06%	29,35%	68,99%	13,09%
	Kriteria	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa efektivitas anggaran belanja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 belum mencapai target namun sudah dalam kategori kurang efektif dalam merealisasikan anggaran belanja. Hal ini disebabkan karena tidak mengoptimalkan anggaran yang digunakan, dimana penggunaan anggaran realisasi belanja tidak mencapai target anggaran belanja yang ditetapkan

Efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan

pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang untuk tahun 2018-2021 menunjukkan kriteria cukup efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran realisasi belanja lebih kecil dari target anggaran belanja sehingga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dapat berhemat dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun kinerja Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang kurang maksimal dalam merealisasikan anggaran.

KESIMPULAN

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran dan realisasi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 sampai dengan 2021

dapat dikatakan cukup efektif karena rata-rata yang dicapai 84,26% hal ini disebabkan karena tidak mengoptimalkan anggaran yang

dogunakan, dimana penggunaan anggaran realisasi belanja tidak mencapai target anggaran belanja yang ditetapkan. Sedangkan untuk perhitungan efisiensi anggaran dan realisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dari tahun 2018-2021 sudah efisien karena

nilai yang dicapai 62,48% hal ini disebabkan karena anggaran realisasi belanja lebih kecil dari terget anggaran belanja sehingga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dapat berhemat dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- (2014). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cetakan Pertama UUI Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nafarin. (2007). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Penerbit Graha Ilmu.
- Supriyono. (2015). *Syarat-Syarat Anggaran*. Jakarta: E Savitri.